

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Afrizal. (2023). *Resolusi Konflik*. Leuwinanggung : PT. RajaGrafindo Persada.
- Artajaya, Praditha. (2024). *Hukum Adat Bali Denyut Nadi Dalam Gempuran Globalisasi*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Darmadah, G. (2019). *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV. HIRA TECH.
- Fajar. Mukti, Achmad, Y. (2015) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan : Wal ashri Publishing.
- Isshaq. H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta.
- Karolina. D, Randy. (2021). *Kebudayaan Indonesia*. Jawa Tengah : Eureka Media Akasara.
- Lestari, Y. (2023) *Pardigma Pelanggaran HAM di Indonesia*. JawaTengah: Lakeisha.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataran: Mataram University Prees.
- Nuridin, N. (2022) *Ham, Gender Dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. Jatinangor: CV Sketsa Media.
- Nuridin.N. Athahira.U.A. (2022). *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*. CV. Sketsa Media.

Pelu, I. E. A. S, dkk. (2022). *Perbandingan budaya hukum: Perdamaian adat badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua*. Yogyakarta: K-Media

Pratama, A.G. (2023). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jatinangor : CV. Mega Press Nusantara.

Purnama, A. D. (2021). *Integrasi Hukum Adat dengan Norma HAM Internasional di Indonesia*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Press.

Sahir Hafni Syafrida. (2021). *Metode Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Sari, dkk. (2023). *Dasar – Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi.

Setiawan, I. N. (2020). *Kolaborasi Eksternal dalam Penguatan Hukum Adat*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Siombo, Wiludjeng. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Subagiasta. K. I, dkk. (2024). *Filosofi Hukum Adat*. Denpasar Utara: PT. Dharma Pustaka Utama.

Sulistiani. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Suratman, Dillah, H.P. (2015) *Metode Penelitian Hukum* . Bandung: Alfabeta

Susiani. D. (2022). *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Tahta Media Group.

Syafrida. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : KBM Indonesia.

Tirtayasa, I. G. (2020). *Perlindungan Sumber Daya Alam dalam Hukum Adat*. Denpasar: Pustaka Bali.

Utama. (2022). *Hak Asasi Manusia*. Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT).

Artikel dalam Jurnal

Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

Daud, dkk. (2025). Efektivitas Penyelesaian Sengketa HAM Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (2), 5 – 8.

Dewi, dkk. (2024). Kajian Hukum Pewarisan Harta Benda Terhadap Anak Perempuan Yang Sudah Kawin Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, (4), 2-4.

Dewi. (2022). Penerapan Sanksi Adat Kasepekan Di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung. *Jurnal Komunikasi Hukum*, (8), 35 – 36.

Dewi. T. A. M. A. A. (2022). Penerapan Sanksi Adat Kasepekan Di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (1), 32 – 39.

Dirkarenszha. R. dkk. (2024). Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Urug melalui Studi Etnografi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, (10), 219 – 220.

Earlene, dkk. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 7(2), 144-161.

Flora. S. H. (2017). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Law Pro Justitia*, (2), 41-60.

Grace. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex et Societatis*, (3), 161-163.

Kurniawan, dkk. (2023). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan *Dispute Resolution Outside Of Court*. *Jurnal Kompilasi Hukum*, (8), 67-72.

Mahayuda, H.P, dkk. (2020). Penyelesaian Masalah di Desa Dengan Pendekatan Restorative Justice Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, Volum 8 Nomer 2, 23-28.

Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.

Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran

Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.

Mangku, D.G.S., Rai Yulianti, N.P., Lasmawan, I.W. (2022) *Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory*, *Unnes Law Journal*, Volum 8 Nomer 2, 245–262.

Marta, P., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan oleh UNICEF pada penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata Kongo. *Ganesha Law Review*, 4(2), 84-92.

Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Wawasan Yuridika*, 3(2), 177–198.

Nazril, dkk. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, (1), 2-4.

Prasetyo. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Indigenous Knowledge: Jurnal Universitas Sebelas Maret*, (1), 52-54.

Putra, dkk. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sain*, (6), 2-6.

Rato. D. (2021). Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinnka Tunggal Ika di Era Digital. *Majalah Hukum Nasional*, (51), 167-169.

Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

Safitri. A. A, dkk. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(2), 20 – 25.

Sinombor. H. S. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Universitas Kristen Indonesia*, 3 (1). 3 – 4.

Siregar, dkk. (2023). Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal of Social Science Research*, 3(5), 11050-11064.

Sobarnapraja. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, (14), 18-20.

Sofyan. A, dkk. (2018). Peran Pemerintah Terhadap Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Masyarakat Papua Pegunungan. *Equality before the law*, (4), 88-90.

Sudiarto, dkk. (2023). Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Komplikasi Hukum*, 8(1), 67-72.

Sukirno. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lintasan Waktu. *Diponegoro Private Law Review*, 4 (3), 45 – 50.

Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, (7), 4-7.

Tan, D. (2021) Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volum 8 Nomer 8 (2463–2477)

Yana, dkk. (2020). *Implementation of Human Rights Fulfillment and Protection in Indonesia’s Criminal Justice System*. *Jurnal Konstituen*, (2), 75–87.

Yoga, dkk. (2023). Awig – Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, (25), 295.

Yulianingsih. (2024). Perlindungan Reprensif dalam *Awig-Awig* di Bali pada Penyelesaian Sengketa Adat. *Unes Law Review*, (6), 6-8.

Yulianingsih.W. (2024). Perlindungan Represif dalam *Awig-Awig* di Bali pada Penyelesaian Sengketa Adat. *Unes Law Review*, 6 (4). 9891-9895.

Artikel dalam Internet

Ningsih. (2023). “Sejarah Perkembangan Hukum Adat di Indonesia”. Kompas.com. Tersedia pada <https://www.kompas.com/stori/read/2023/07/07/170000779/sejarah-perkembangan-hukum-adat-di-indonesia?page=2>(diakses tanggal 15 Mei 2025).

Prasetya. (2024). “Menghina Pemangku Kahyangan Tiga, Sekeluarga di Desa Adat Telaga, Buleleng, Kena Sanksi Kasepekang”. Radar Buleleng.Id. Tersedia

pada <https://radarbuleleng.jawapos.com/busungbiu/amp/2164824031/menghina-pemangku-kahyangan-tiga-sekeluarga-di-desa-adat-telaga-buleleng-kena-sanksi-kasepekan> (diakses tanggal 16 Mei 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Perundang-Undangan.